



STRUKTUR KELEMBAGAAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH/MADRASAH

Rusdiana Navlia¹, Nabila Oktafia², Ita³, Irfan⁴
Universitas Islam Negeri Madura^{1,2,3,4}

rusdiananavlia005@gmail.com¹, nabilaoktavia1123@gmail.com², itaismilaa@gmail.com³, irfantufiq123@gmail.com⁴

Abstrak

Perpustakaan sekolah/madrasah memiliki peran strategis sebagai pusat informasi, literasi, dan pendukung pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur kelembagaan perpustakaan sekolah/madrasah serta perannya dalam meningkatkan kualitas layanan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus multi-situs, yang memungkinkan pengkajian secara mendalam terhadap hierarki organisasi, pembagian tugas, serta tantangan pengelolaan pada berbagai jenjang pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur organisasi yang jelas dan sistematis mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan perpustakaan, mengoptimalkan pemanfaatan koleksi, serta meningkatkan kepuasan pemustaka. Struktur ini mencakup peran kepala sekolah sebagai penanggung jawab, kepala perpustakaan sebagai koordinator operasional, serta unit layanan teknis, layanan pemustaka, dan teknologi informasi yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Pada jenjang yang lebih tinggi, integrasi teknologi informasi menjadi aspek penting dalam mendukung layanan digital dan pembelajaran berbasis ICT. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa struktur kelembagaan yang kuat berkontribusi dalam mendukung program literasi dan implementasi kurikulum berbasis kompetensi. Sebaliknya, keterbatasan struktur yang tidak jelas dapat menyebabkan tumpang tindih tugas, beban kerja berlebih, dan rendahnya kualitas layanan. Dengan demikian, struktur kelembagaan perpustakaan sekolah/madrasah merupakan elemen penting dalam manajemen pendidikan yang berfungsi sebagai fondasi strategis untuk meningkatkan kualitas layanan dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan.

Kata kunci : *Struktur Kelembagaan, Perpustakaan Sekolah, Manajemen Perpustakaan*

Abstract

School/madrasah libraries play a strategic role as centers of information, literacy, and learning support. This study aims to analyze the institutional structure of school/madrasah libraries and its role in improving service quality. The method used is a descriptive qualitative approach with a multi-site case study design, enabling an in-depth examination of organizational hierarchy, task distribution, and management challenges across different educational levels. The results show that a clear and systematic organizational structure can enhance the efficiency and effectiveness of library management, optimize the utilization of collections, and increase user satisfaction. This structure includes the role of the principal as the person in charge, the head librarian as the operational coordinator, and units such as technical services, user services, and information technology, which are adjusted to the level of education. At higher levels, the integration of information technology becomes an important aspect in supporting digital services and ICT-based learning. Furthermore, this study finds that a strong institutional structure contributes to supporting literacy programs and the implementation of competency-based curricula. Conversely, unclear structures can lead to overlapping tasks, excessive workloads, and low service quality. Therefore, the institutional structure of school/madrasah libraries is an essential element in educational management, serving as a strategic foundation to improve service quality and support the achievement of educational goals.

PENDAHULUAN

Perpustakaan sekolah/madrasah berperan strategis sebagai pusat informasi, literasi, dan kolaborasi pembelajaran, sebagaimana ditekankan dalam berbagai jurnal manajemen pendidikan. Struktur organisasi yang jelas diperlukan untuk mengatasi tantangan seperti keterbatasan SDM profesional, anggaran minim, dan tuntutan layanan digital, yang sering menghambat optimalisasi fungsi perpustakaan. Menurut studi pustaka dalam Jurnal Rengas (2026), organisasi yang baik meningkatkan minat baca siswa, menyediakan sumber belajar beragam, serta mendukung kurikulum berbasis kompetensi.¹ Tanpa struktur yang solid, perpustakaan cenderung beroperasi secara reaktif, mengakibatkan rendahnya utilisasi koleksi dan minimnya kontribusi terhadap pencapaian tujuan pendidikan nasional. Relevansi struktur ini semakin tinggi di konteks Indonesia saat ini, di mana regulasi seperti Standar Nasional Perpustakaan menuntut akuntabilitas dan efisiensi operasional.² Dasar hukum struktur kelembagaan perpustakaan sekolah/madrasah bersumber dari Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, yang mewajibkan setiap sekolah memiliki organisasi perpustakaan berjenjang. Panduan resmi Kemdikbudristek merinci bagan organisasi, dengan kepala sekolah sebagai pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan. Jurnal "Pengelolaan Perpustakaan Sekolah" menyoroti bahwa kepala sekolah menunjuk kepala perpustakaan dan staf, sementara pembagian tugas dilakukan secara internal untuk fleksibilitas.³ Standar ini disesuaikan per jenjang: SD/MI dengan fokus layanan dasar, SMP/MTs menambahkan koordinasi lebih luas, dan SMA/MA mengintegrasikan layanan teknologi informasi. Struktur organisasi perpustakaan sekolah dasar/ibtidayah terdiri dari kepala sekolah/madrasah, kepala perpustakaan, bagian layanan teknis (pengolahan bahan), dan layanan pemustaka (sirkulasi serta bimbingan). Kepala perpustakaan bertugas merencanakan program, mengawasi operasional, dan melapor kepada kepala sekolah, sementara layanan teknis menangani inventarisasi dan perawatan koleksi. Untuk SMP/tsanawiyah, struktur serupa ditambah penekanan pada koordinasi antarstaf, dengan staf dibagi ke administrasi, pelayanan, dan penjagaan. Di SMA/aliyah, ditambahkan layanan teknologi informasi untuk katalog digital dan akses daring, memastikan perpustakaan mendukung pembelajaran berbasis ICT.⁴

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus multi-situs untuk menganalisis struktur kelembagaan perpustakaan sekolah/madrasah secara mendalam dan kontekstual. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan judul artikel yang menekankan peran strategis perpustakaan sebagai pusat literasi, memungkinkan deskripsi rinci tentang hierarki organisasi, pembagian tugas, dan tantangan operasional di berbagai jenjang pendidikan.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Fungsi Struktur Kelembagaan Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Struktur kelembagaan perpustakaan sekolah/madrasah didefinisikan sebagai kerangka organisasi formal yang mengatur hierarki jabatan, pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab antar elemen untuk mendukung fungsi perpustakaan sebagai pusat sumber belajar dan literasi di satuan pendidikan formal. Pengertian ini mencakup bagan organisasi mulai dari kepala sekolah

¹ Azka Fathan Fansuri, "Manajemen Dan Organisasi Perpustakaan Sekolah Dalam Mendukung Pembelajaran" 2 (2026): 54–65.

² Median Efrina et al., "Pengelolaan Perpustakaan Sekolah," 2009, 517–24.

³ Kementerian Pendidikan and D A N Kebudayaan, "Panduan Kerja," 2017.

⁴ A Kerangka Teoritis and Manajemen Perpustakaan Sekolah, "Bab II," n.d., 8–58.

⁵ Anggi Puspa Lestari and Zaka Hadikusuma Ramadan, "Profil Pengelolaan Perpustakaan Di Sekolah Dasar" 6 (2021): 201–8.

sebagai pimpinan tertinggi, kepala perpustakaan sebagai manajer operasional, hingga bagian layanan teknis dan pemustaka, yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan untuk efisiensi dan efektivitas.⁶

Struktur kelembagaan perpustakaan sekolah/madrasah merupakan sistem penataan yang menunjukkan hubungan fungsional, garis komando, dan alur kerja guna mencapai tujuan pendidikan nasional melalui pengelolaan informasi dan koleksi pustaka. Menurut makalah struktur organisasi sekolah/madrasah, struktur ini bersifat hirarkis dengan kepala sekolah bertanggung jawab penuh, diikuti kepala perpustakaan yang melakukan perencanaan, pengarahan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan. Jurnal Profil Pengelolaan Perpustakaan SD menambahkan bahwa pengertian ini melibatkan adaptasi terhadap Standar Nasional Perpustakaan, di mana struktur memastikan koordinasi dengan kurikulum dan kebutuhan pemustaka.⁷ Pada jenjang SD/MI, struktur dasar mencakup layanan teknis (pengolahan bahan) dan pemustaka (sirkulasi), sementara SMP/MTs dan SMA/MA menambahkan layanan teknologi informasi untuk mendukung era digital.

Fungsi Utama Struktur Kelembagaan adalah pengorganisasian sumber daya, di mana kepala perpustakaan menyusun program kerja tahunan, mengatur inventarisasi, katalogisasi, dan pengadaan koleksi, sementara staf teknis menangani operasional rutin. Fungsi kedua meliputi pengarahan dan pengawasan, memfasilitasi komunikasi vertikal (laporan ke kepala sekolah) serta evaluasi kinerja untuk meningkatkan layanan bagi siswa dan guru. Fungsi ketiga adalah perencanaan strategis dan inovasi, termasuk integrasi ICT untuk katalog digital dan program literasi, yang mendukung Merdeka Belajar sebagaimana dijelaskan dalam jurnal pengorganisasian perpustakaan. Secara keseluruhan, fungsi ini memaksimalkan utilisasi perpustakaan sebagai agen pendidikan efektif.

Susunan Organisasi Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Susunan organisasi perpustakaan sekolah/madrasah merupakan hierarki jabatan dan pembagian tugas formal yang dirancang sistematis untuk mendukung operasional efisien sebagai pusat sumber belajar dan literasi di satuan pendidikan formal. Susunan ini bersifat hirarkis dengan kepala sekolah/madrasah sebagai puncak tanggung jawab tertinggi, diikuti kepala perpustakaan sebagai koordinator operasional, serta unit layanan teknis dan pemustaka yang bervariasi per jenjang pendidikan untuk memastikan koordinasi vertikal-horizontal yang optimal.⁸ Susunan organisasi dibangun atas prinsip hirarki komando, spesialisasi fungsi, dan span of control yang jelas, di mana setiap jabatan memiliki wewenang dan tanggung jawab spesifik untuk menghindari tumpang tindih tugas. Kepala sekolah bertugas strategis (persetujuan program, alokasi anggaran), sementara kepala perpustakaan mengeksekusi operasional harian termasuk perencanaan, pengarahan, dan pengawasan staf. Makalah Struktur Organisasi Perpustakaan Sekolah/Madrasah secara eksplisit mendefinisikan bahwa susunan ini wajib dibentuk setiap awal tahun ajaran melalui SK kepala sekolah, dengan kriteria minimal 6 rombongan belajar dan 1.000 judul koleksi untuk pengangkatan kepala perpustakaan profesional.⁹

a. Susunan Organisasi SD/MI (Jenjang Dasar).

Pada SD/MI, susunan paling sederhana mencakup empat elemen utama:

- Kepala Sekolah/Madrasah: Penanggung jawab keseluruhan, mengawasi pencapaian target literasi sekolah.
- Kepala Perpustakaan: Koordinator yang menyusun Rencana Kerja Perpustakaan (RKP), mengelola inventaris, dan melapor langsung ke kepala sekolah.
- Layanan Teknis: Pengolahan bahan pustaka (seleksi, akuisisi, katalogisasi, klasifikasi).
- Layanan Pemustaka: Pelayanan sirkulasi, bimbingan pengguna dasar, dan promosi membaca.

⁶ Konsep Dasar, "Konsep Dasar Dan Pengantar Manajemen Perpustakaan Sekolah," 1998, 1–54.

⁷ Lestari and Ramadan, "Profil Pengelolaan Perpustakaan Di Sekolah Dasar."

⁸ Efrina et al., "Pengelolaan Perpustakaan Sekolah."

⁹ Penyelenggaraan Perpustakaan Madrasah, "7329:2009 Adalah," 2013, 1–9.

Struktur ini digambarkan dalam bagan formal di berbagai jurnal, dengan garis komando vertikal langsung dan koordinasi minimal horizontal antarunit. Modul Organisasi Perpustakaan Sekolah menegaskan bahwa untuk SD kecil (<500 siswa), jabatan teknis/pemustaka sering dijabat guru secara rotasi untuk efisiensi sumber daya.¹⁰

b. Susunan Organisasi SMP/MTs (Jenjang Menengah Pertama)

Susunan SMP/MTs diperluas dengan penekanan koordinasi tim:

- Kepala Sekolah/Madrasah: Integrasi dengan program kurikulum dan evaluasi tahunan.
- Kepala Perpustakaan: Manajer operasional yang membawahi 3-4 staf dengan sub-bagian spesifik.
- Layanan Teknis: Pengelolaan koleksi lanjutan termasuk inventarisasi periodik dan weeding.
- Layanan Pemustaka: Sirkulasi lanjutan, layanan referensi sederhana, dan kegiatan klub baca.

c. Susunan Organisasi SMA/MA SMK/MAK (Jenjang Menengah Atas)

Pada jenjang tertinggi, susunan paling kompleks untuk mendukung literasi digital:

- Kepala Sekolah/Madrasah: Koordinasi dengan rencana strategis sekolah dan akreditasi.
- Kepala Perpustakaan: Pemimpin profesional dengan wewenang pengadaan terbatas.
- Layanan Teknis: Pengolahan metadata digital, preservasi, dan evaluasi koleksi.
- Layanan Pemustaka: Layanan referensi mendalam, diskusi akademik, dan e-learning support.
- Layanan Teknologi Informasi: Pengelolaan OPAC, database daring, dan infrastruktur ICT.
- Administrasi Pendukung: Keuangan, pelaporan, dan hubungan masyarakat.

Standar Nasional Perpustakaan secara spesifik mengamankan penambahan unit TI untuk jenjang ini, dengan kepala perpustakaan minimal S1 Pustakawan. Jurnal Manajemen dan Budaya menjelaskan bahwa hierarki ini langsung di bawah kepala sekolah untuk menjamin integrasi dengan sistem pendidikan nasional.¹¹

Mekanisme Penunjukan dan Evaluasi dilakukan melalui SK kepala sekolah berdasarkan kompetensi manajerial dan teknis, dengan evaluasi kinerja semesteran menggunakan indikator SNP seperti tingkat kunjungan, sirkulasi, dan kepuasan pengguna. Tantangan implementasi meliputi dual role guru-pustakawan dan keterbatasan fasilitas, yang diatasi melalui pelatihan InHuPus (Inovasi Pengelolaan Perpustakaan Sekolah).¹² Secara keseluruhan, susunan organisasi ini memastikan perpustakaan sekolah/madrasah berfungsi optimal sebagai penunjang Merdeka Belajar, dengan efisiensi operasional yang terukur melalui struktur hirarkis yang adaptif.

Peran Struktur dalam Meningkatkan Layanan Perpustakaan

Struktur organisasi perpustakaan memiliki peran sentral dalam menentukan efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan yang diberikan kepada pemustaka. Dengan struktur yang jelas, perpustakaan dapat mengelola sumber daya manusia, koleksi, dan teknologi secara terkoordinasi sehingga semua fungsi kunci pengadaan, pengolahan, sirkulasi, layanan pemustaka, dan teknologi informasi berjalan sinergis dan terarah. Penelitian terkini menunjukkan bahwa perpustakaan yang menerapkan struktur organisasi yang terdefinisi baik cenderung mencapai kinerja layanan yang lebih optimal dan kepuasan pemustaka yang lebih tinggi.¹³ Meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan dalam struktur organisasi yang jelas memungkinkan pembagian tugas, tanggung jawab, dan

¹⁰ Standar Nasional, Perpustakaan Sekolah, and Dasar Madrasah, "Standar Nasional Perpustakaan (SNP)," 2011.

¹¹ Lombok Timur, "Manajemen Perpustakaan Dalam Meningkatkan Minat Baca Peserta Didik Di SMA Negeri 1 Wanasaba Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur NTB" 2, no. 2 (2022): 1–16.

¹² Makmur Syukri and Ade Putra, "Manajemen Organisasi Perpustakaan" 06, no. 01 (2023): 9706–14.

¹³ Jurnal Pelita and Ilmiah Pendidikan, "Jurnal Pelita Ilmiah Pendidikan

<https://Jurnalpelitanegribelantaraya.Com/Index.Php/Rengas> Volume 2 Nomor 1 Tahun 2026 ISSN (Online): Xxx-Xxx" 2 (2026): 103–15.

wewenang yang terdefinisi sehingga mengurangi tumpang tindih kerja dan meningkatkan efisiensi operasional. Dalam konteks perpustakaan, setiap unit seperti bagian layanan teknis, pelayanan pemustaka, dan teknologi informasi memiliki fungsi spesifik yang mendukung proses pengadaan, pengolahan, klasifikasi, dan pelayanan koleksi. Kepala perpustakaan berperan sebagai koordinator utama yang mengintegrasikan semua unit ini untuk mencapai tujuan bersama. Studi manajemen perpustakaan modern menunjukkan bahwa struktur yang terintegrasi dengan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan signifikan dalam meningkatkan efisiensi layanan dan mempercepat respons terhadap kebutuhan pengguna.¹⁴

Struktur organisasi yang solid memperkuat kapasitas layanan prima dengan memastikan sumber daya manusia yang kompeten di setiap unit, mulai dari pustakawan hingga staf administrasi. Pengelompokan tugas berdasarkan fungsi memungkinkan spesialisasi, seperti layanan referensi yang fokus pada bimbingan pemustaka dalam menemukan informasi, atau layanan teknologi yang mengurus sistem otomatisasi dan koleksi digital. Penelitian pada perpustakaan tingkat sekolah dan perguruan tinggi menunjukkan bahwa perpustakaan dengan struktur jelas dan tugas terorganisir memiliki kualitas layanan yang lebih baik dan tingkat kepuasan pemustaka yang lebih tinggi. Pendekatan berorientasi pengguna dalam struktur ini juga memfasilitasi kolaborasi dan kemitraan, serta evaluasi berkelanjutan untuk peningkatan layanan.¹⁵ Struktur organisasi perpustakaan tidak hanya berupa bagan, tetapi menjadi kerangka manajemen terpadu yang menjamin perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan layanan berjalan secara sistematis. Dalam penelitian manajemen perpustakaan sekolah, struktur organisasi yang jelas disebutkan sebagai salah satu indikator terlaksananya fungsi pengorganisasian yang baik, yang selanjutnya memengaruhi kualitas layanan sirkulasi, layanan baca, dan Layanan TIK.¹⁶ Kurangnya struktur yang jelas (misalnya satu orang menangani banyak tugas sekaligus) menyebabkan beban kerja pustakawan bertambah dan kualitas layanan menurun. Dalam satu penelitian di perpustakaan SMA, divisi Layanan TIK dijalankan oleh satu orang, sehingga tugas utama dan fungsi teknisnya “terbagi” dan tidak terfokus, mengakibatkan layanan digital kurang optimal.

Struktur organisasi perpustakaan bukan hanya kerangka formal, tetapi fondasi dinamis yang memungkinkan adaptasi terhadap teknologi digital dan perubahan kebutuhan pengguna, sehingga layanan perpustakaan tetap relevan dan mutakhir.

KESIMPULAN

Struktur kelembagaan perpustakaan sekolah/madrasah merupakan fondasi penting dalam mendukung fungsi perpustakaan sebagai pusat informasi, literasi, dan pembelajaran. Keberadaan struktur organisasi yang jelas mampu mengatur pembagian tugas, wewenang, serta tanggung jawab secara sistematis sehingga seluruh kegiatan perpustakaan berjalan lebih efektif dan efisien. Dengan struktur yang baik, perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan buku, tetapi juga sebagai pendukung utama proses pembelajaran dan pengembangan kompetensi siswa.

Selain itu, struktur organisasi yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan (SD/MI, SMP/MTs, hingga SMA/MA) memungkinkan pengelolaan perpustakaan yang lebih relevan dengan kebutuhan pengguna, termasuk integrasi teknologi informasi pada jenjang yang lebih tinggi. Peran kepala sekolah, kepala perpustakaan, serta pembagian unit layanan teknis dan pemustaka menjadi kunci dalam menciptakan koordinasi yang optimal dan pelayanan yang berkualitas. Lebih lanjut, struktur kelembagaan yang solid juga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas layanan, kepuasan pemustaka, serta optimalisasi pemanfaatan koleksi perpustakaan. Sebaliknya, ketiadaan struktur yang jelas dapat menyebabkan tumpang tindih tugas, beban kerja tidak seimbang, dan menurunnya kualitas layanan.

¹⁴ Dasar, “Konsep Dasar Dan Pengantar Manajemen Perpustakaan Sekolah.”

¹⁵ Risma Putri Oktarina et al., “Implementasi Manajemen Dan Digitalisasi Perpustakaan Di SMA Negeri 13 Surabaya,” no. 4 (2025): 1–10.

¹⁶ Info Artikel, “Efektivitas Manajemen Perpustakaan” 03 (2024): 21–29, <https://doi.org/10.56406/jsm.v3i01.407>.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa struktur kelembagaan perpustakaan bukan sekadar formalitas organisasi, melainkan sistem manajerial strategis yang berperan besar dalam menunjang keberhasilan program pendidikan, khususnya dalam meningkatkan budaya literasi dan mendukung implementasi pembelajaran berbasis kompetensi di sekolah/madrasah.

REFERENSI

- Artikel, Info. “Efektivitas Manajemen Perpustakaan” 03 (2024): 21–29.
<https://doi.org/10.56406/jsm.v3i01.407>.
- Dasar, Konsep. “Konsep Dasar Dan Pengantar Manajemen Perpustakaan Sekolah,” 1998, 1–54.
- Efrina, Median, Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, Rambat Nur Sasongko, Prodi Map, Fkip Unib, and Prodi M A P Unib. “Pengelolaan Perpustakaan Sekolah,” 2009, 517–24.
- Fansuri, Azka Fathan. “Manajemen Dan Organisasi Perpustakaan Sekolah Dalam Mendukung Pembelajaran” 2 (2026): 54–65.
- Lestari, Anggi Puspa, and Zaka Hadikusuma Ramadan. “Profil Pengelolaan Perpustakaan Di Sekolah Dasar” 6 (2021): 201–8.
- Madrasah, Penyelenggaraan Perpustakaan. “7329:2009 Adalah,” 2013, 1–9.
- Nasional, Standar, Perpustakaan Sekolah, and Dasar Madrasah. “Standar Nasional Perpustakaan (SNP),” 2011.
- Oktarina, Risma Putri, Raditya Eko Syaputra, Sa Munawwaroh, Jihan Abida, and Alyadea Puspita. “Implementasi Manajemen Dan Digitalisasi Perpustakaan Di SMA Negeri 13 Surabaya,” no. 4 (2025): 1–10.
- Pelita, Jurnal, and Ilmiah Pendidikan. “Jurnal Pelita Ilmiah Pendidikan <https://jurnalpelitanegribelantaraya.com/index.php/rengas> Volume 2 Nomor 1 Tahun 2026 ISSN (Online): Xxx-Xxx” 2 (2026): 103–15.
- Pendidikan, Kementerian, and D A N Kebudayaan. “Panduan Kerja,” 2017.
- Syukri, Makmur, and Ade Putra. “Manajemen Organisasi Perpustakaan” 06, no. 01 (2023): 9706–14.
- Teoritis, A Kerangka, and Manajemen Perpustakaan Sekolah. “Bab II,” n.d., 8–58.
- Timur, Lombok. “Manajemen Perpustakaan Dalam Meningkatkan Minat Baca Peserta Didik Di SMA Negeri 1 Wanasaba Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur NTB” 2, no. 2 (2022): 1–16.